

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam".
- Al-Buthi, Sa'ad Ramadhan, 1992, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Aravik, Havis, 2017, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Asshiddiqie, 2006, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,
- Bagir Manan, 2004 *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press.),
- Bayu Dwi Anggono, (2019) "Peranan Presiden Dalam Penataan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang", *Jurnal Majelis*
- Fathurrahma Djamil, , 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Satria Efendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Rahman Fazlur, 1982 , "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Mille", Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam Transition: Islamic Perspective*, (New York : Oxford University Press,)
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York,
- Hans Nawiaski, dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriya,,
- Suyuthi Pulungan J., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2009, *Maqashid Syariah*, Terj. Khimawati, Jakarta: Amzah.
- Jimly Ashidiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,)
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, , 2020 "Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia", (Jakarta: Konstitusi Press)
- Jimly Asshiddiqie, ,2007 "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer)
- Jozef Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Grasindo.

- Hans Kelsen, 2009, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA,
- Hilmi Mahmud, 1978, *Nizham al-Hukm al-Islami*, (kairo: Dar al-Hadi,)
- Maria Farida Indarti, 2004 “*Ilmu Perundang-Undangan*”, (Yogyakarta: Kanisius,)
- Maria Farida Indrati S. 2020 *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. Edisi Revisi. Sleman: Penerbit PT Kanisius,
- Maria Farida Indrati Soeprato 2006, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*,
- Masdar Farid Mas’udi, 2010, *Syarah Konsttisi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet)
- Moh.Mahfud MD, 2012 “*Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*”, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Munawir Sjadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press)
- Ni’matul Huda, 2009 “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, (Bandung: Nusa Media,)
- Riant D Nugrohu, ,2003 *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo,
- Riant D Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk negara-negara berkembang* (Jakarta,)
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perindang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,
- Saldi Isra, , 2010 “*Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Sofyan Apendi. 2021. *Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Pakuan Law Review* Volume 7 Nomor 1
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukiati, 2016, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* , Medan : CV Manhaji.
- Taufik H. Simatupang, (2019) “*Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19 Nomor 2

Tim Peneliti, 2009, “*Laporan Penelitian Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional.*”, (Jakarta: Kerja sama antara DPR dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UGM,)

Zaydan, Abdul Karim, 2009, *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola.

Zuhaili, Wahbah. 1986, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

## B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

A. Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita – Pelita IV”, (Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia Tahun)

Atamimi, A, Hamid S, 1990, Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,

Dimas Nur Kholbi, 2019, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, , 2021 “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1.

Abul A'la Maududi, *The Islamic Law And Constitution*, terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam"

Aprista Risyawati, (2020) “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative law and Government Journal* Volume 3 Nomor 2

Ardika Nurfurqon, (juli 2020), *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*, Jurnal Yustika, Vol.23 No. 01.

Harun, 2009, *Pemikiran Najmudin At-Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Huku m Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5.

Ja'far Shodiq, Dkk, Desember 2020, *Fiqh Pandemi: Tinjauan Kritis terhadap PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dengan Pendekatan Sadd al-Dhari'ah*, Akademika Volume 14, Nomor 2.

Mukharom, Havis Aravik, (2020), *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.7 No.3.

Samsuduha, (juli 2020), *Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam*, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2.

Sumantri, , 2013 *Tentang kebijaksanaan Pemerintah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan,

Wieke Dewi Suryandari, Thn 2021, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Uud Nri Tahun 1945 Dan Pp Nomor 21 Tahun 2020*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia ISSN Volume 02, No. 01.

Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, , 2021 “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah”, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1.

### C. Online

alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat Disadur dari <https://www.hukumonline.com> (di akses pada 8 September 2022)

Antara, “Pengamat: Penurunan Kasus Covid-19 Tunjukkan Efektivitas PPKM”, Borneo News 1 September 2021, diakses 1 Agustus 2022, <https://www.borneonews.co.id/berita/233292-pengamat-penurunan-kasus-covid-19-tunjukkan-efektivitas-ppkm>

Arif Tio Buqi Abdulah.. PP Tentang PSBB Dinilai Terlalu Minimalis, Pakar: Belum Menjelaskan Lebih Detail.. Website: <https://m.tribunnews.com/amp/corona/2020/04/01/pp-tentang-psbb-dinilai-terlalu-minimalis-pakar-belummenjelaskan-lebih-detail>, Diakses pada (24 September 2020)

Aspek Hukum Dalam Penanganan Pandemi Covid- 19 di akses dari <https://manadopost.jawapos.com/> pada tanggal 20 Juli 2021.

Data Covid-19 Pada 31 Desember 2020 diakses dari <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 11 Oktober 2021.

Di sadur dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat-lt5e85796f160b4?page=all> (diakses pada 8 September 2022)

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H pp inilah yang kita harapkan untuk menangani covid-19 di indonesia, Di sadur dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/> (di akses pada 6 September 2022)

Fathorrahman. Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2018, 60 <https://repository.unej.ac.id/>, diakses 20 juni 2022

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, diakses dari <https://mui.or.id/> pada tanggal 30 Agustus 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-psbb-harus-mendapat-restu-pemerintah-pusat-lt5e847795ecc2f?page=all>, Di akses pada (6 september 2022)

Kemkes. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Diakses Dari Kukor.Kemkes.Go.Id. pada tanggal 3 September 2021.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (31 Maret 2020). Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. <https://www.setneg.go.id/>. Diakses pada (8 September 2022).

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19, Diakses dari <https://www.viva.co.id/> pada 11 Oktober 2021.

Putri, Risa Herdahita. tth. “*Wabah Sejak Zaman Rasulullah.*” Artikel. Diakses di <https://historia.id> pada tanggal 29 Agustus 2021.

Saldi Isra, “Menjadi Pembantu Presiden”, Kompas 14 April 2016, diakses 14 juni 2022, <https://www.saldisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html>

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.